

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kewenangan Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Mutasi Pejabat Struktural dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia, serta menganalisis perlindungan hukum terhadap mutasi pejabat struktural dalam peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu penulis memfokuskan permasalahan tesis ini pada dua hal, pertama bagaimana pengaturan kewenangan Kepala Daerah terhadap pelaksanaan mutasi pejabat struktural dalam perspektif Perundang-Undangan di Indonesia, yang kedua bagaimana perlindungan hukum terhadap mutasi pejabat struktural dalam peraturan Perundang-Undangan. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan dan menelaah peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan yang dibahas, terutama yang berkaitan dengan mutasi pejabat struktural dan juga dalam penelitian ini dibantu dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berdasarkan teori-teori yang dipakai oleh para ahli. Hasil Penelitian yang diperoleh berdasarkan analisis dan pembahasan, pertama yang harus dilakukan dengan menerapkan sistem pengisian jabatan dan pembinaan kepegawaian dengan sistem pengisian jabatan yang didasarkan pada pendekatan *merit system* atau *career system* dan bukan dengan pendekatan *nepotism* atau *spoil system*. Pengisian jabatan dalam birokrasi didasarkan pada keahlian dan prestasi pribadinya melalui mekanisme perekrutan yang terbuka dan *fair*. Kedua ditemukan adanya Permasalahan hukum yaitu dalam pelaksanaan mutasi pejabat struktural melalui system merit itu sendiri. Upaya hukum bagi pejabat pimpinan tinggi yang salah atau cacat dalam pengangkatannya melalui sistem merit pada proses pengisian Jabatan struktural adalah upaya represif dan penyelesaian sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. Adapun saran dari penulis pertama menyarankan dibuat adanya Peraturan Daerah terkait tunjangan atau Lumpsum serta tempat tinggal dalam semasa melaksanakan tugasnya jika seorang ASN dimutasikan antar Kota atau Kabupaten. Kedua untuk mengukur kinerja pejabat struktural dilingkungan Pemerintahan Daerah perlu adanya inovasi dalam teknologi yang berbentuk aplikasi didalam Playstore dan IOS yang berisikan laporan kegiatan harian secara online.

Kata Kunci : Mutasi Jabatan Struktural, Perlindungan Mutasi ASN, Undang-Undang Jabatan Struktural.

The Authority of the Regional Head Against Mutation of Structural Officials in the Perspective of Laws and Regulations in Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this research is to study the authority of Regional Heads in Implementing Structural Officials' Movements in the Legislative Perspective in Indonesia, as well as analyzing legal protection against structural officials' mutations in legislation. Therefore, the author focuses on this thesis on two things, first concerning the licensing of regional heads for implementing mutations of officials in the perspective of legislation in Indonesia, which discusses the laws on negotiations with legislation. To solve this problem, the author uses the normative juridical research method by collecting and reviewing the legislation needed and relevant to the debates discussed, related to mutations of officials, and also in this study with the help of invitations and using conceptual (conceptual approach) based on theories used by experts. Research results obtained based on analysis and discussion, first must be done by implementing a system of filling positions and fostering staffing with a system of filling positions in accordance with the achievement system or career system and not by using nepotism or booty. The filling of positions in the bureaucracy is based on his personal expertise and achievements through open and fair recruitment supervision. Secondly, there is a legal problem, namely in the implementation of structural officials mutations through the merit system itself. Legal remedies for high officials who are wrong or flawed in their appointment through the merit system in the process of procuring structural positions are repressive representatives and dispute assistance conducted by ASN. There was a suggestion from the first author that was made about a Regional Regulation related to allowances or lump sums as well as a place to stay while carrying out their duties if the ASN was transferred between Cities or Regencies. Second, to measure the performance of local government dilatation officials, it is necessary to have a presence in technology that combines applications in Playstore and IOS which contain daily activity reports online.

Key Word : Keywords: Structural Position Mutation, ASN Mutation Protection, Structural Position Law.